# BAB III
# PERUBAHAN KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISU HAK ASASI MANUSIA SETELAH TERPILIHNYA OBAMA SEBAGAI PRESIDEN

Bab ini akan memaparkan beberapa perubahan yang terjadi di Amerika Serikat terkait dengan kebijakan AS dibawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Perubahan tesebut dilihat dari perubahan kebijakan AS terhadap Irak dan Afghanistan, dan kebijakan Obama untuk penutupan kamp Guantanamo. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana Obama mempromosikan HAM dan demokrasi, serta hubungan Obama dengan dunia Islam.

## A. Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS Setelah Terpilihnya Presiden Obama

Warisan cukup berat yang harus ditanggung presiden Barach Obama dari pendahulunya, George W. Bush, adalah jatuhnya citra baik AS sebagai penyuara hak asasi manusia dan pendorong demokrasi hingga ke titik terendah. Kebijakan utilitarian AS yang lebih mengedepankan opsi militer dan intervensi berlebihan yang dimulai di Afganistan, kemudian Irak, serta penanganan para tahanan di Guantanamo, membuat AS mendapatkan citra buruk hingga kecaman dari berbagai negara. Kebijakan Bush memang mudah dipahami, mengingat di awal kepemimpinannya AS harus menghadapi fakta yang sangat menyakitkan. Serangan terorisme 9/11 tidak hanya menyerang nilai-nilai kemanusiaan tetapi

juga keamanan nasional AS. Karena tragedi tersebut menjadi serangan pertama kali yang diderita AS di dalam negaranya sendiri setelah periode perang. Karena itu pula mengapa kebijakan AS tampak lebih "emosional" dan bernada balas dendam. Sebagai negara adidaya—yang dalam pandangan siapapun akan sulit diserang secara langsung—mendapatkan serangan mengerikan di WTC dan gedung Pentagon tentu sebuah pukulan yang sangat memalukan. Kebijakan perang melawan terorisme yang dikampanyekan Bush seolah menjadi jawaban atas kekecewaan dan ketakutan yang dihadapi AS. Meski demikian, langkah Bush yang berlebihan dan melanggar batas-batas kemanusiaan justru menuai kecaman hingga membuat citra AS terpuruk.

Hal inilah yang harus dihadapi oleh Obama sebagai pengganti Bush. Mengembalikan citra baik AS sebagai negara *super power* di dunia internasional memang bukan perkara mudah namun harus dilakukan Obama. Pandangan yang berbeda antara Obama dan Bush memang sudah tampak sejak Obama menjadi senator. Ia menjadi salah satu senator yang cukup vokal mengkritik kebijakan Bush di Irak, yang menurutnya sudah salah sejak awal dan mendatang kerugian yang cukup besar bagi AS sendiri. Dalam setiap kampanye-kapanyenya sebagai calon presiden, Obama juga selalu mengkritik kebijakan Bush dan memberikan harapan akan politik AS yang lebih baik. Karena itu ketika Obama terpilih menggantikan Bush, perubhan politik luar negeri AS terkait HAM dan demokrasi mulai tampak dengan jelas. Hal ini tidak hanya sebagai pemenuhan janji politiknya ketika mencalonkan diri sebagai presiden tetapi seklaigus sebagai

upaya mengembalikan citra AS yang lebih ramah dan terbuka di mata dunia internasional.

Kebijakan yang segera diambil Obama adalah terkait penjara Guantanamo yang banyak menampung para tahanan di masa pemerintahan Bush yang diduga terlibat aksi terorisme. Guantanamo memang menjadi sorotan dunia internasional karena dinilai melanggar hak asasi manusia dengan berbagai tindakan yang melecehkan nilai kemanusiaan. Begitu juga kebijakan AS di Irak dan Afganistan. Selain itu, Obama berupaya mengembalikan komitmen AS ke jalur kebijakan mempromosikan demokrasi dan dialog. Upaya merangkul negara-negara Timur Tengah, walaupun tetap diwarnai berbagai kecurigaan, juga mulai dilakukan.

### *1. Kebijakan Luar Negeri AS di Guantanamo*

Penjara Guantanamo menjadi salah warisan kebijakan yang harus dihadapi dan diselesaikan Obama, mengingat sorotan dunia internasional akan kebijakan AS di penjara yang menampung para tahanan yang terlibat terorisme tersebut terus datang bertubi-tubi. Dengan adanya isu yang mengatakan bahwa para penjaga di Guantanamo telah melanggar HAM dengan memperlakukan tahanan tidak secara manusiawi dan beberapa cara interogasi yang berlangsung secara kasar membuat AS merasa malu, karena selama ini negara adidaya tersebut memandang dirinya sebagai negara yang demokratis dan sangat menjunjung tinggi HAM.

Oleh karenanya, semenjak masa kampanye hingga terpilihnya Presiden Obama, tuntutan dan desakan dari masyarakat AS dan dunia internasional terus didengungkan untuk menutup penjara tersebut. Obama sendiri juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan sebuah pendekatan yang lain dan sesuai dengan nilai dan moral yang dianut bangsa AS. Sementara bagi partai Demokrat yang menjadi basis politik Obama, penutupan ini telah menjadi program prioritas dalam pemerintahan Demokrat yang memang sangat mengedepankan masalah-masalah HAM dalam kebijakan luar negerinya.

Obama kemudian mengeluarkan surat perintah penutupan penjara yang berada di Guantanamo, Kuba, dalam tenggat waktu satu tahun karena telah mencoreng citra AS sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi HAM. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa sejumlah tahanan akan dilepaskan dan tahanan lain akan dituntut di pengadilan AS. Para tersangka akan mendapatkan hak konstitusional dan pengadilan terbuka. Obama merasa dengan adanya penjara di Guantanamo, memperlihatkan kearogansian AS terhadap Negara-negara Islam dan para tahanan disana pun diperlakukan secara tidak manusiawi. Akibat adanya penjara Guantanamo, hubungan AS dengan Negara-negara Islam pun sedikit ternodai, karena Kamp tahanan militer di Guantanamo digunakan untuk menahan orangorang yang dianggap sebagai "petempur musuh" yang ditangkap oleh pasukan AS dan sekutu di sekeliling dunia dalam aksi yang disebut "perang melawan terorisme" yang banyak disebutkan pada masa kepemimpinan Presiden George W Bush terutama pada saat perang di Afghanistan sedang berlangsung. Kebanyakan para tahanan yang ditangkap oleh pasukan AS adalah dengan tujuan

untuk dapat menumbangkan rejim Taliban di Afghanistan. Citra Amerika telah babak belur sejak bukti penyiksaan dan penganiayaan di Guantanamo, selain di penjara Abu Gharib di Irak, pertama kali terungkap. Fasilitas-fasilitas ini telah menampung para tersangka terorisme yang ditangkapi sejak 11 September 2001, dan walaupun para pejabat AS berkata banyak dari tahanan itu yang bersalah, para aktivis hak-hak asasi manusia bertanya bagaimana mereka bisa begitu yakin mengingat ketiadaan tuntutan dan prosedur hukum yang jelas.

Pemerintah AS mendapatkan tekanan dari dalam negerinya sendiri ketika terungkap pelanggaran HAM yang terjadi di penjara Guantanamo. Lingkungan sosial masyarakat AS merasa tidak nyaman dengan tuduhan dari Negara lain yang mengatakan bahwa negaranya telah melanggar HAM terhadap para tahanan yang berada di penjara Guantanamo. Presiden Obama pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat AS, maka ia merespon tekanan dari masyarakatnya dengan mengumumkan akan segera menutup kamp tahanan militer AS di Guantanamo, Kuba. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan CNN/Opinion Research Corporation, sekitar 51 persen warga Amerika yang diwakili melalui jajak pendapat itu mendukung penutupan penjara Guantanamo sedangkan 47 persen meyakini penjara itu harus dipertahankan dan menjaga para tersangka teror tetap berada di penjara itu.[1]

Menurut Human Right Watch pada Juni 2008, tahanan yang masih berada di penjara Guantanamo telah berada dalam penahanan AS selama kurang lebih 6

[1] Harian *Kompas*, Edisi Minggu 1 Februari 2009, hal. 5

tahun lamanya tanpa pernah didakwa atas sebuah kejahatan, maka tanpa adanya kejelasan status hukum bagi para tahanan tersebut penjara ini lebih baik untuk ditutup. Kenneth Roth, direktur eksekutif dari Human Rights Watch, mengatakan bahwa "keputusan Mahkamah Agung telah melucuti Guantanamo dari alasan keberadaannya: sebuah wilayah bebas hukum tempat para tahanan tidak dapat menantang penahanan mereka."[2] Ia menambahkan bahwa keputusan itu "tidak hanya kemenangan yang sangat penting bagi keadilan, ini juga merupakan sebuah langkah besar menuju pembentukan kebijakan penangkalan terorisme yang lebih cerdas, lebih efektif dengan cara menutup penjara Guantanamo."[3]

Lingkungan internasional memberikan respon yang sangat positif ketika presiden Obama mengumumkan akan segera menutup kamp tahanan militer AS di Guantanamo, Kuba. Karena seperti yang telah diketahui bahwa keberadaan penjara Guantanamo ini sangat meresahkan tidak hanya bagi masyarakat Amerika sendiri namun juga bagi masyarakat internasional. Tekanan-tekanan dari lingkungan internasional pun diberikan kepada pemerintah AS, tekanan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di penjara Guantanamo tersebut. Pelanggaran HAM yang dirasakan para tahanan ini seringkali terjadi terutama pada saat dilakukannya proses interogasi. Pelanggaran itu sendiri diartikan sebagai hal yang resmi untuk masa depan Amerika Serikat. Pelanggaran hak ini dilakukan pada pemerintahan rezim Bush yang dianggap

---

[2]"Obama Perintahkan Penutupan Guantanamo"http://www.vhrmedia.com/2008/Obama-Perintahkan-Penutupan-Guantanamo-berita331.html, [diunduh 3 November 2011]
[3] *Ibid*

sebagai kewajiban sah di bawah hukum internasional dan domestik serta berbagai upaya dari beberapa komandan militer senior untuk melegalisir pelanggarannya.

Pada tahun 2006 yang lalu PBB sebagai penjaga perdamaian di dunia merasa sangat prihatin dengan kondisi para tahanan di Guantanamo, dan merasa perlu untuk membuat suatu tim khusus untuk memberikan perlindungan HAM bagi para tahanan di Guantanamo. Pemerintah Amerika Serikat sendiri pernah memberikan izin kepada PBB untuk mengunjungi penjara Guantanamo, namun tim PBB itu menolaknya karena pemerintah AS memberikan persyaratan untuk tidak melakukan pertemuan langsung dengan tahanan, padahal itu merupakan prasyarat standar dalam setiap "on-site visit" bagi mekanisme HAM PBB. Laporan Komite Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Committee Against Turture) yang terdiri dari 10 ahli independen, menegaskan bahwa AS harus menutup fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo dan mengizinkan para tahanan memperoleh proses pengadilan atau membebaskan mereka.[4]

Secara politis, kebijakan Obama yang jauh berbeda dari pendahulunya dengan menutup penjara Guantanamo diambil selain karena sudah merupakan agenda dan orientasi politik Obama dan partai pengusungnya, Demokrat, juga karena Presiden Afro-Amerika pertama ini mau membedakan dirinya dengan Pemerintahan Bush yang mendirikan pengadilan militer untuk mengadili para tawanan di pangkalan Angkatan Laut di Kuba dan menentang keras membawa tahanan ke AS. Alasan lain yang dapat kita tarik adalah bahwa Obama ingin

[4] "Tutup Kamp Guantanamo" berita diakses melalui http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/2006/05/19/tutup_kamp_guantanamo.php#005098 [diakses 4 November 2011]

mengubah citra AS di mata internasional yang terus merosot akibat perlakuan tidak adil AS menyangkut HAM dan masalah terorisme. Politik luar negeri AS akan lebih diarahkan pada penegakan hukum internasional. Hingga hubungan AS akan lebih dekat dengan negara-negara yang selama ini sudah jenuh dengan tingkah laku standar ganda AS. Amerika Serikat yang selama ini menyebut dirinya sebagai polisi dunia mencoba meyakinkan dunia internasional bahwa dia sendiri bukan teroris. Tindakan ini dinilai sebagai langkah AS yang secara perlahan mulai merubah pandangan mereka tentang terorisme.

Namun demikian, untuk mewujudkan sepenuhnya kebijakan penutupan Guantanamo, Obama juga menghadapi kendala yang tidak mudah. Alasannya, rencana itu memerlukan pembentukan sebuah sistem hukum baru untuk menangani sejumlah informasi penting dalam sebagian besar kasus sensitif serta bagaimana menanganai para tahanan yang tidak diterima di negara aslinya karena sampai saat ini belum ditemukan sebuah negara pun yang bersedia menerima para tahanan yang dianggap sebagai para teroris oleh AS dan tidak pernah diintrogasi serta diadili secara hukum.[5]

### 2. *Kebijakan Luar Negeri AS di Irak*

Sebelum terpilih menjadi Presiden AS, Barrack Obama dalam kampanyenya menyatakan akan melakukan perubahan kebijakan luar negeri AS

[5] "Penutupan Guantanamo dan Terorisme Internasional" berita diakses melalui http://www.scribd.com/doc/16441621/Penutupan-Guantanamo-Dan-Terorisme-Internasional [diakses 4 November 2011]

untuk Irak, salah satunya dengan penarikan militer AS dari Irak. Setelah terpilih menjadi Presiden, Presiden Obama kemudian mengumumkan srategi baru Washington yang akan diberlakukan di Irak. Berdasaran program baru Obama, sekitar sepertiga pasukan AS yang ditempatkan di Irak ditarik pada agustus 2010, sisanya sekitar 35 hingga 50 ribu pasukan tetaap tinggal di Irak hingga akhir 2011 sebagai penasehat militer, menghadapi teroris dan menjaga kepentingan Washington.

Ketika mengumumkan berakhirnya masa penugasan militer tentaranya di Irak Obama menyebut momen tersebut sebagai tanda tamatnya perang Irak. Tidak hanya itu, Obama juga mengenang keputusannya sebagai peristiwa bersejarah. Presiden kulit hitam pertama AS itu menyatakan, "Misi perang Irak telah berakhir, namun komitmen AS terhadap masa depan Irak belum berakhir". Obama meyakini bahwa 'ufuk baru' di Irak telah dimulai. Istilah itu sengaja dipakai sebagai ganti istilah yang dimasyhurkan Pemerintahan AS di era Presiden Bush pada tahun 2003 yang menyebut invasi ke Irak sebagai "Operasi Pembebasan". Dengan mengulang beberapa kali ungkapan "berakhirnya operasi pembebasan Irak" Obama berusaha memaksimalkan istilah barunya tersebut untuk mempromosikan propaganda barunya menyangkut isu Irak. Momentum tersebut sengaja dieksploitasi oleh Obama agar menjadi bukti dia telah melaksanakan janjinya dalam kampanye dulu.

Berdasarkan laporan PBB pada tahun 2007, terdapat 1.980 warga sipil dan militer yang tewas sejak invasi AS ke Irak pada maret 2003, sebuah angka yang

mengejutkan. Banyak pengamat yang menilai angka yang merupakan kesalahan pemerintah sebelum Obama inilah salah satu isu yang memenangkan Obama dalam Pilpres AS. Maka ketika Obama memangkan pemilihan, harapan besar dititipkan padanya untuk dapat meredam gejolak yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Irak, Afghanistan.

Dalam mengakhiri perang Irak, setidaknya ada beberapa alasan retorik yang digunakan oleh Obama. *Pertama,* untuk memenuhi janjinya saat kampanye pemilihan Presiden AS yang lalu. Kini ia dituntut oleh warganya untuk memenuhi janjinya. *Kedua,* biaya besar yang harus ditanggung gedung putih untuk membiayai perang di Irak dan Afghanistan sangat besar. Apalagi dengan resesi ekonomi yang dilanda Amerika, para wajib pajak di Negara adidaya ini mempertanyakan alokasi uang yang mereka bayar kepada pemerintah. Mereka tidak rela membiarkan uangnya digunakan untuk perang yang tidak jelas alasannya. *Ketiga,* tekanan internasional dan organisasi intenasional seperti PBB dan OKI yang menolak langkah intervensi militer AS di Irak walaupun dengan dalih penciptaan demokrasi.[6]

*Good evening. Tonight, I'd like to talk to you about the end of our combat mission in Iraq, the ongoing security challenges we face, and the need to rebuild our nation here at home.*[7]

---

[6] Dikutip dari skripsi mahasiswa HI UMY

[7] "President Obama's Address on Iraq", *New York Times,* diakses melalui http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/01obama-text.html?pagewanted=all [diakses 4 November 2011].

Demikian kata pembuka Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, ketika memulai penarikan tentara AS di Irak, 31 Agustus 2010. Penarikan pasukan AS ini dianggap sebagai tanda diakhirinya misi perang di Irak.

Presiden Obama melanjutkan pidatonya: *From this desk, seven and a half years ago, President Bush announced the beginning of military operations in Iraq. Much has changed since that night. A war to disarm a state became a fight against an insurgency. Terrorism and sectarian warfare threatened to tear Iraq apart. Thousands of Americans gave their lives; tens of thousands have been wounded. Our relations abroad were strained. Our unity at home was tested.*[8]

Negara Irak telah berubah. Penguasa Irak yang cukup disegani, Saddam Hussein, telah dihukum gantung. Partai Bath yang mendominasi kekuasaan negeri 1001 malam itu, telah dilarang dan para pengikutnya 'dikejar' oleh penguasa baru Irak. Kini, Irak menjadi negara federal, setelah referendum, 15 Oktober 2005. Ketika konstitusi Irak tengah dibahas, ada perbedaan pandangan antar kelompok dalam pembicaraan bentuk negara. Kelompok Syiah dan Kurdi menyetujui bentuk negara federal, yang memberikan otonomi luas kepada setiap wilayah federal. Tetapi, kelompok Sunni menentang dengan keras bentuk negara federal.

Syiah dan Kurdi yang terpinggirkan selama masa pemerintahan Saddam Hussein ingin hidup lebih baik dengan mengelola wilayahnya sendiri yang kaya minyak. Wilayah Irak utara yang dikuasai Kurdi dan wilayah Irak selatan yang dikuasai Syiah merupakan tambang minyak Irak. Kedua kelompok itu khawatir bila bentuk negara seperti pada masa Saddam Hussein, kekayaan minyak mereka akan disedot ke pemerintah pusat. Sementara itu, pihak Sunni menolak ide federalisme karena khawatir pemerintahan yang desentralisasi akan mengurangi

---

[8] *Ibid*

pembagian mereka atas hasil ladang minyak bumi yang berada di daerah Kurdi dan Syiah. Kalangan Sunni juga menganggap bentuk federal akan memecah belah Irak. Tiga kelompok itu, terus bermain dalam politik Irak. Pada pemilu 2005, para elite mereka menempati posisi penting. Presiden Irak dari kelompok Kurdi; Perdana Menteri dari kelompok Syiah; dan Ketua Parlemen dari kelompok Sunni.

Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, persaingan antar kelompok masih terlihat. Pertikaian dan konflik muncul di berbagai tempat. Kelompok yang berafiliasi ke Sunni menyerang kelompok Syiah dan sebaliknya. Bahkan mereka sudah cenderung brutal dalam bertindak. Korban berjatuhan dan kebrutalan terus berjalan. Pertikaian antar kelompok inilah yang seringkali dijadikan alasan oleh AS untuk tetap menempatkan pasukannya di Irak.

*Now, it's time to turn the page, what America can do, and will do, is provide support for the Iraqi people as both a friend and a partner.*[9]

Hubungan AS dan Irak akan dimulai dengan lembaran baru. Dasar hubungan mereka adalah 'mutual interest' dan 'mutual respect'. Urusan keamanan dalam negeri Irak akan diselesaikan oleh bangsa dan pemimpin Irak sendiri.

### 3. *Kebijakan Luar Negeri AS di Afghanistan*

Kebijakan perang yang dikeluarkan oleh Bush dengan dalih melawan terorisme ternyata mendapat respon negatif dari dunia internasional karena banyaknya korban jiwa dari pihak sipil yang tidak tahu apa-apa. Dengan situasi

---

[9] *Ibid*

dan kondisi tersebut eksistensi AS sebagai Negara pelopor demokrasi yang mengutamakan perdamaian mulai pudar. AS di masa pemerintahan Bush enggan untuk melakukan diplomasi maupun negoisasi dengan pemerintahan yang tidak disukai Bush atau dianggap Bush sebagai musuh-musuh AS. AS dimasa Presiden Bush hanya meminta atau lebih tepatnya mengecam Taliban yang saat itu berkuasa di Afghanistan untuk menyerahkan teroris buruan utama AS yaitu Osama bin Laden yang akhirnya permintaan itu ditolak oleh Taliban.

Berbeda dengan Bush, diplomasi yang hendak dibangun oleh AS era Obama berupaya memperbaiki citra tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis yaitu mau berunding dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai musuh AS, salah satu contohnya adalah Taliban. Pendekatan dialogis dengan Taliban ini sebenarnya bertentangan dengan Bush yang tak menginginkan dialog dengan Taliban sebagai musuh AS. Presiden Obama bersedia melakukan perundingan kepada para Taliban moderat dengan harapan mencapai suatu rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian di Afghanistan. Rekonsiliasi tersebut saat ini sedang dilakukan oleh Hillary Clinton (foto terlampir) sebagai Menlu AS. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Menlu AS di masa pemerintahan Bush baik itu Collin Powell yang terkenal moderat ataupun Condolezza Rice seorang Neokonservatif arogan.

Usul Hillary mengenai rekonsiliasi tersebut sebagai berikut: "Mereka harus ditawari sebuah bentuk rekonsiliasi yang terhormat dan diberikan jalan untuk berintegrasi kembali ke dalam suasana masyarakat yang damai, apabila

mereka bersedia meninggalkan kekerasan, memutuskan hubungannya dengan Al Qaeda dan mendukung konstitusi."[10] Menurut Hillary sebagai pemangku puncak kebijakan luar negeri AS, rekonsiliasi dengan Taliban moderat sangat penting untuk kemajuan diplomasi AS di Afghanistan. Hillary juga berharap pemerintah Afghanistan mendapatkan dukungan baik dalam negeri Afghanistan sendiri maupun internasional agar bisa memisahkan para ekstrimis Al Qaeda dengan Taliban yang bergabung dalam kelompok tersebut hanya karena keterpaksaan dan bukan karena suatu keyakinan.

Selain itu, diplomasi Hillary terkait masalah Afghanistan yaitu melakukan pendekatan regional dengan Iran untuk memerangi terorisme di Afghanistan dan perbatasan Pakistan-Afghanistan. Pendekatan regional dengan Iran ini juga belum pernah dilakukan oleh Menlu AS di masa pemerintahan Bush karena Iran, Irak dan Korea Utara oleh Bush dianggap sebagai poros kejahatan.[11] Pendekatan regional dengan Iran ini diharapkan bisa mengatasi masalah Afghanistan. Hal ini karena anggapan Iran mempunyai peran yang harus dimainkan di Afghanistan sebagai Negara tetangga Afghanistan, pernyataan ini diungkapkan dalam konferensi PBB tentang Afghanistan di Den Haag, Belanda pada 31 Maret 2009.[12] Iran pun menanggapi dengan baik tawaran itu, Iran secara terbuka menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali Afghanistan. Pemimpin Pusat Studi Amerika mengenai Afghanistan yang hadir pada konferensi PBB itu,

---

[10] Nye Jr., Joseph S, 2006, "In Mideast, the goal is 'smart power'", *Boston Globe*, August 19th, 2006.
[11] "Mungkinkah Iran-AS bisa Berdamai" diakses melalui http://waspada.co.id [diakses 4 November 2011].
[12] http://www.dw-world.de, "K7T PBB Untuk Afghanistan ", [diakses 4 November 2011].

Omar Sharif, menerangkan "Iran tahu bahwa opsinya tak banyak di Afghanistan. Dan pemerintahan di Teheran tidak menginginkan kemenangan Taliban dan Al Qaeda di negara tetangganya. Sebuah pemerintah Sunni yang fundamental di kabul bakal menjadi ancaman bagi Iran."[13]

Semasa pemerintahan Presiden Bush, Afghanistan bukanlah menjadi prioritas utama kebijakan perang melawan terornya. Presiden Bush setelah menumbangkan rezim Taliban di Kabul, Afghanistan mengalihkan perhatiannya pada Irak yang dianggap mempunyai senjata pemusnah massal dan merrpunyai kedekatan hubungan dengan Al Qaeda. Untuk itulah Bush lebih memprioritaskan Irak dari pada Afghanistan, maka diplomasi pemerintahannya untuk Afghanistan hanya dijalankan oleh Menlu AS yaitu Collin Powell dan tidak mengirimkan Utusan Khusus AS untuk Afghanistan. Saat itu Powell bertolak ke India dan Pakistan, tetangga Afghanistan, karena Powell ingin mencari kepastian apakah masih ada dukungan bagi aksi militer AS.[14]

Berbeda dengan Bush yang lebih mempixoritaskan Irak daripada Afghanistan, Afghanistan menurut anggapan Obauna adalah awal dimana perang terhadap teror dimulai dan disitu jugalah perang akan diakhiri. Sesuai janji Obama yang akan membuat perdamaian di Afghanistan yang dianggap sangat penting bagi keamanan nasional AS. Obama selain mengutus Menlunya yaitu Hillary Clinton untuk mengatasi perang di Afghanistan juga menunjuk utusan khusus

---

[13] http:l/www.dw-world.de, "Iran Hadiri K7T PBB Untuk Afghanistan di Denhaag [diakses 5 November 2011].

[14] http://www.rnw.nl, "Serangan di Afghanistan sudah memasuki minsgu kedua ", [diakses 5 November 2011].

untuk Afghanistan dan Pakistan yaitu Richard Hoolbroke mantan duta besar AS di PBB.

Penunjukan dan pengiriman Utusan Khusus AS ke Afghanistan dan Pakistan yang sebelumnya belum pernah dilakukan AS semasa pemerintahan Bush adalah sebagai upaya mewujudkan perdamaian atas delapan tahun pendudukan AS di Afghanistan dan untuk membuat sinyal perubahan kebijakan politik luar negeri AS. Hillary Clinton mengatakan dalam pelantikan yang dihadiri oleh Presiden Obama dan Wakil Presidennya Joe Biden, "Duta Besar Holbrooke akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah untuk suatu upaya mencapai sasaran tujuan strategi Amerika Serikat di wilayah tersebut."[15]

Presiden Obama menggelar trilateral meeting antara Presiden Afghanistan dan Presiden Pakistan di Gedung Putih 6 Mei 2009. Pertemuan yang dilakukan bersama Hillary Clinton dan Richard Hoolbroke itu membahas perlunya peningkatan kerjasama antara Afghanistan dan Pakistan untuk melawan terorisme Taliban dan Al Qaeda yang ada di wilayah Pakistan-Afghanistan. Dalam perjalanan menemui Obama di Oval Office, Menlu AS Hillary Clinton bercakap-cakap dengan dua pemimpin Negara itu. "Kami tahu bahwa negara anda bertempur keras dengan para ekstremis yang akan mendestabil isasi dan meremehkan demokrasi," kata Clinton.[16] "Kami ada di pihak saudara kami Karzai dan orang-orang Afghanistan melawan ancaman utama ini, yang saya sebut

---

[15] " http://www.kapanlagi.com, "Hoolbroke Utusan Khusus AS Untuk Afghanistan ", [diakses 5 November 2011].

[16] http://www.arrahmah.com, "Pertemuan Pemimpin Munafik Afghanistan-Pakistan dengan AS dimulai" [diakses 5 November 2011].

sebagai sebuah kanker," kata Zardari. [17] Karzai mengatakan Pakistan dan Afghanistan "seperti saudara kembar." Ia menambahkan: "Penderitaan masing-masing adalah penderitaan bersama."[18]

Setelah memasuki tempat pertemuan, Hillary Clinton kemudian memperkenalkan Zardari dan Karzai kepada Presiden Obama. Hillary Clinton memperkenalkan Zardari dan Karzai sebagai "Presiden yang memimpin negara mereka pada waktu yang sulit dalam sejarah, yang bekerja keras untuk mempertahankan dan memelihara demokrasi dan yang mengerti bahwa kita menghadapi musuh bersama. Kita mungkin datang dari berbagai tempat dan inemiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita menghadapi musuh bersama dan oleh karenanya kami telah menemukan penyebab umum."[19]

Presiden Obama pun kemudian mengatakan "Kita bertemu hari ini sebagai tiga Negara berdaulat bergabung dengan tujuan umum: untuk mengganggu, membongkar dan mengalahkan Al Qaeda dan sekutu-sekutu ekstrimisnya di Pakistan dan Afghanistan, dan untuk mencegah kemampuan mereka untuk beroperasi di berbagai Negara di masa depan nanti. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus menangkal ruang mereka yang mengancam warga Pakistan, warga Afghanistan atau warga AS. Dan kita juga harus memajukan keamanan dan

[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] http://www.huffingtonpost.com, "Obama,Zardari, Karzai Meet To Discuss Taliban's Growing Strength ", [diakses 5 November 2011].

kesempatan sehingga warga Pakistan dan warga Afghanistan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik."[20]

Selama masa pemerintahan Presiden Bush, AS menjanjikan menyebarkan demokrasi dan HAM dengan cara letap memberantas sisa-sisa Taliban dan A1 Qaeda. Rencana kebijakannya yaitu bekerjasama dengan pemerintahan dan rakyat Afghanistan agar AS dapat memberi bantuan keamanan, pembangunan dan rekonstruksi Afghanistan dengan lancar. Namun rencana itu hanya menjadi rencana karena sampai masa pemerintahan Bush selesai, Afghanistan tetap tidak mengalami perubahan signifikan dan membuat rakyat Afghanistan kecewa. Hal itu dikarenakan Presiden Bush lebih memprioritaskan kebijakan melawan terornya di Irak.

Hal inilah yang tengah diupayakan oleh pernerintahan AS di bawah Presiden Obama yang memprioritaskan Afghanistan sebagai kebijakan perang melawan terornya. Di Afghanistan, Presiden Obama tengah mempersiapk,an strategi menyeluruh untuk Afghanistan dengan prioritas utama memastikan A1 Qaeda tidak bisa menyerang AS dan kepentingan-kepentingannya serta kepentingan sekutu-sekutunya. Upaya yang akan ditempuh oleh pemerintahan Obama untuk merealisasikannya dengan pembangunan perekonomian Afghanistan. Pembangunan di Afghanistan akan dilakukan oleh pemerintahan Obama sebagai upaya diplomasinya untuk mengamankan kepentingan nasional yaitu keamanan nasional AS di Afghanistan.

---

[20] http://www.whitehousf-.gov, "Joined by a Common Goal", [diakses 5 November 2011].

Pembangunan infrastruktur di Afghanistan pun sudah disiapkan oleh Presiden Obama, paraa ahli di berbagai bidang, termasuk pertanian, rancang bangun, dan hukum akan segera dikirim ke Afghanistan. Untuk membiayai program ini, Obama telah menghubungi Kongres AS dan meminta Kongres AS mengijinkan penggunaan dana sebesar 1,5 milyar dolar AS per tahun selama lima tahun yang akan datang. Dana tersebut untuk pembangunan sekolah, jalan, rumah sakit yang telah porak poranda akibat invasi AS semasa presiden Bush yang membuat citra buruk AS di mata dunia internasional.

## B. Promosi Obama Terkait Demokrasi

Salah satu kebijakan Obama yang mendapat perhatian penting adalah promosi AS terkait demokrasi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat AS di bawah kepemimpinan sebelumnya, George W. Bush, mewariskan citra buruk dan pesimisme global di bidang demokrasi. AS, di bawah Bush, dipandang tidak saja telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi di dunia internasional melalui kampanye-kampanye ambisiusnya namun juga memberikan dampak yang negatif bagi upaya-upaya penegakan demokrasi. Sebagai presiden AS yang baru, Obama menjadi harapan sekaligus mendapat tekanan yang cukup tinggi untuk mengembalikan kembali supremasi dan harga diri AS di mata dunia.[21] Salah satunya melalui upaya menempatkan kembali AS sebagai negara yang mendorong upaya-upaya penegakan demokrasi. Karena itu salah satu perubahan cukup

[21] Thomas Carothers, 2009, *Democracy Promotion Under Obama: Finding Way Forward,* Carnegie Endowment for International Peace, diakses melalui http://carnegieendowment.org/files/democracy_promotion_obama.pdf [diakses 5 November 2011].

signifikan sekaligus cukup berat bagi Obama adalah memformulasikan kembali politik luar negeri AS dalam mempromosikan demokrasi.

Politik luar negeri AS dalam mempromosikan demokrasi sebenarnya juga menjadi perhatian penting pemerintahan Bush. Politik internasional yang diwarnai wacana perang melawan terorisme di awal pemerintahan Bush mendorong AS giat mempromosikan demokrasi. Bush percaya bahwa mempromosikan demokrasi bisa memberikan kontribusi penting dalam melawan terorisme. Karena itu, AS menggagas program-program yang turut melibatkan negara-negara di Timur Tengah untuk melakukan reformasi. Sejak tahun 2002, misalnya, dalam rangka mendukung terjadinya reformasi di bidang politik dan sosial konomi, pemerintahan Bush mendorong program bantuan dana dan inisiatif diplomasi melalui program Middle East Partnership Initiative (MEPI). Namun Bush tampaknya tidak banyak memberikan kemajuan. AS di bawah Bush tetap saja mendukung rezim-rezim yang terkenal korump, otoriter, dan represif. Kepentingan-kepentingan nasional ekonomi dan politik serta keamanan AS di Timur Tengah seolah mengalahkan upaya-upaya penegakan demokrasi.

Selain itu kebijakan AS dalam mengintervensi Irak semakin menjauhkan AS dari citra baik dalam membangun demokrasi, begitu juga intervensi AS di Palestina terutama dengan penolakan AS atas kemenangan Hamas dalam pemilu demokratis di tahun 2006.[22] AS di bawah Bush, lebih melihat beberapa kelompk Islam kanan dan radikal yang ada baik di Mesir, Irak, Lebanon maupun Palestina

[22] *Ibid*, hal. 3.

sebagai penghalang dari upaya-upaya "mendemokratiskan" negara-negara Arab. Selain itu, kedekatan dengan dua negara yang sebenarnya menjadi "penantang" AS, Cina dan Rusia, serta kedekatan yang tetap dipertahankan AS dengan negara-negara non demokratis seperti Azerbaijan, Etiopia, negara-negara Teluk, Kazakstan dan Pakistan, semakin menunjukkan bahwa kebijakan Bush hanya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Buruknya citra AS terkait penegakan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari warisan pemerintahan Bush. Hal ini lebih dikarenakan pandangan Bush dan pemerintahannya dalam mendorong demokrasi itu sendiri. Kesalahan—jika bisa disebutkan demikian—dari pemerintahan Bush terkait promosi dan penegakan demokrasi adalah kebijakan yang didasarkan pada dua kerangka utama: (a) promosi demokrasi dalam perspektif adanya pergantian rezim, dan (b) intervensi demokrasi melalui cara-cara paksaan—bahkan militer.

Karena itu, kebijakan-kebijakan AS di bawah Bush terutama dalam penegakan demokrasi di Timur Tengah lebih banyak menunjukkan premis dari kedua cara pandang di atas. Perang Afganistan dan Irak menunjukkan hal itu. Alih-alih membawa demokrasi bagi seluruh masyarakat, intervensi AS di kedua negara tersebut justru lebih menunjukkan strategi rasional dan politik realis AS.[23] Intervensi ke Irak, misalnya, yang semula didasarkan pada asumsi yang keliru akan adanya senjata pemusnah masal yang kemudian misinya berganti kepada

---

[23] Lihat Patrick J. Glen, 2011, *Democracy Promotion in the Obama Administration: An Opportunity to Match Action to Rhetoric,* Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 10-31. Diakses melalui http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/495 [12/11/2011], hal. 35.

penegakan demokrasi, lebih banyak bernuansa penegakan demokrasi yang ganjil karena diwarnai secara dominan oleh upaya penggulingan Saddam Hussein sebagai musuh AS serta pemaksaan melalui kekuatan militer. Tidak mengherankan jika kebijakan AS kemudian menghasilkan persepsi buruk di sebagian besar negara di dunia, di mana aksi tersebut dipandang hanya semata-mata sebagai upaya represif AS demi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politiknya di Timur Tengah. Promosi akan demokrasi kemudian dianggap sebagai kebijakan "standar ganda" AS.

Dampak dari kebijakan pemerintahan Bush inilah yang menjadi warisan cukup berat bagi Obama dalam mengembalikan citra baik AS di mata dunia internasional. Setelah terpilih sebagai presiden AS menggantikan Bush, Obama memulai hal tersebut dengan memberikan sinyal positif kepada dunia. Kebijakan cukup cepat yang ia keluarkan adalah menutup camp Guantanamo. Kebijakan ini selain sebagai pemenuhan janji kampanyenya juag menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan negatif yang dilontarkan dunia internasional atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan AS atas tahanan-tahanan yang diduga terlibat dalam aksi terorisme.[24]

Terkait perang Irak, Obama hadir dengan wajah yang lebih terbuka dan siap bekerjasama dengan pemerintahan terpilih untuk membangun demokrasi, begitu juga dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk Iran. Sejak menjadi senator, Obama termasuk cukup vokal mengkritisi kebijakan bergaya

[24] Thomas Carothers, 2009, *Democracy and Human Rights Promotion Under Obama: The Complexities of Reengagement*, Carnegie Endowment for International Peace, diakses melalui http://carnegieeurope.eu/events/?fa=1407 [diakses 5 November 2011].

militeristik tersebut. Walaupun pada perkembangannya, alasan AS menggulingkan Saddam Hussein sebagai upaya penegakan demokrasi dan melindungi warga sipil, nyatanya kebijakan tersebut justru semakin menjauhkan AS dari citra positif dalam penegakan demokrasi. Karena itu, Obama kemudian menegaskan untuk menarik sebagian besar pasukan militer AS dari Irak, dan fokus pada upaya pembangunan demokrasi dengan mendukung pemerintahan demokratis saat ini di negara yang dijuluki sebagai negeri seribu satu malam tersebut.

Obama percaya bahwa promosi demokrasi merupakan prinsip utama dari politik luar negeri AS. Pandangan ini sudah bisa dilihat sejak Obama memulai kampanyenya di tahun 2008, di mana Obama mengatakan "*democracies are our best trading partners, our most valuable allies, and the nations with which we share our deepest values.*"[25] Obama juga berpendapat bahwa negara yang demokratis jauh lebih baik dalam upaya memerangi terorisme, mengurangi penyebarluasan senjata, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat.[26]

Lebih jauh, pengalaman Obama selama menjadi seator juga menunjukkan pandangan yang konsisten terhadap upaya penegakan demokrasi, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari strategi politik luar negeri AS. Obama, misalnya, ketika menjadi seorang senator, ia termasuk salah satu senator yang cukup vokal mengkritik kebijakan utilitarian Bush di Afganistan dan

---

[25] Barack Obama, 2008, *Strengthening Our Common Security by Investing in Our Common Humanity* dikases melalui http://www.cgdev.org/doc/blog/obama_strengthen_security.pdf hal.4 [12/11/2011]

[26] Barack Obama, "Renewing American Leadership," *Foreign Affairs 86, no. 4,* (2007).

Irakyang mengedepankan strategi kekuatan militer. Obama kemudian turut mendukung sepenuhnya rencana peningkatan anggaran untuk bantuan dan promosi demokrasi. Di tahun 2005 ia memperkenalkan "DRC Relief, Security and Democracy Promotion Act", dan juga turut mendukung "The Advance Democracy Act".

Namun demikian, betapapun Obama membangun harapan akan politik luar negeri AS yang berwajah baik, terkait promosi demokrasi masih perlu diuji lebih lanjut. Selain itu tantangan yang dihadapi Obama sendiri tidak bisa dibilang sederhana, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar. *Pertama*, upaya mempromosikan demokrasi bagaimanapun akan selalu dihadapkan pada tantangan bagaimana demokrasi itu dipromosikan serta kondisi di setiap negara yang terbilang unik. Intervensi berlebihan akan berdampak kontraproduktif bagi Obama. Begitu juga pemaksaan akan demokrasi di negara dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Walaupun saat ini gelombang demokrasi menggeliat di negara-negara Arab setelah revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, dan disusul negara-negara lainnya seperti Surian, godaan untuk melakukan intervensi baik secara politik dan ekonomi akan selalu ada.

*Kedua*, dalam mempromiskan demokrasi di negara-negara Timur Tengah, Obama akan menghadapi "kritik" terutama dari rezim-rezim dinastik dan otokratik, berbeda dari periode Bush sebelumnya yang lebih dekat dengan rezim-rezim tersebut dikarenakan kepentingan politik dan ekonomi yang lebih dikedepankan Bush.

*Ketiga*, persoalan keamanan dan ekonomi yang dihadapi AS saat ini jauh semakin kompeks dari yang dihadapi Bush sebelumnya, sehingga membuat perhatian politik luar negeri AS lebih memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Isu-isu seperti keamanan dalam negeri hingga penaggulangan krisis ekonomi kini menjadi isu yang menjadi perhatian utama. Karena itu bisa dipahami mengapa menteri luar negeri AS, Hillary Clinton, menyampaikan kerangka politik luar negeri AS dengan kebijakan *three D:* Defence, Diplomacy, dan Development, yang seolah menempatkan demokrasi di urutan marjinal. AS seolah melupakan *D* yang keempat, yakni Democracy.

## C. Hubungan Obama dan Dunia Islam

Hubungan Amerika Serikat dengan Negara-negara Timur Tengah, yang mana merupakan representasi Islam dalam politik luar negeri Amerika Serikat, dapat dikatakan begitu terpuruk setelah tragedi 11 September 2001. Dimana gedung World Trade Center (WTC) di New York dan Pentagon ditabrak dengan pesawat komersial bajakan. Inilah awal *war on terror* yang dikumandangkan oleh Presiden George W. Bush, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yang dipersepsikan sebagai perang terhadap kaum muslim.

Sejak serangan teroris ke gedung ikon ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terletak di jantung kota New York, World Trade Center (WTC) dan kantor pusat pertahanan AS Pentagon di Washington D.C. pada 11 September 2001. Wacana dalam sistem internasional berubah sama sekali. Ancaman teroris yang

sebelumnya tidak begitu populer, tiba-tiba saja menjadi agenda utama AS. Selanjutnya AS mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama memerangi terorisme. Dalam perkembangannya, upaya AS memberantas terorisme seringkali dikaitkan dengan negara Islam. Hal ini disebabkan aksi-aksi terorisme yang terjadi di AS dilakukan oleh pelaku yang mayoritas berasal dari negara Islam. Hal inilah yang menyebabkan AS terlihat berperilaku diskriminatif terhadap negara-negara Islam.

Setelah dilantik menjadi Presiden AS pada Januari 2009, Presiden Barack Hussein Obama sudah menunjukkan sikap yang dapat dikatakan lebih bersahabat terhadap Islam. Diplomasinya untuk merangkul dunia muslim ditandai dengan lawatan ke Arab Saudi pada bulan Juni 2009 dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kairo, Mesir. Dalam kunjungan ke Kairo, Presiden Obama berpidato di hadapan sekitar 1000 undangan di Universitas Kairo. Mengawali pidatonya dengan kata-kata perdamaian dan *assalamualaikum*, [27] Presiden Obama menginginkan dimulainya babak baru hubungan Amerika dan umat Islam. Ia menyebut kerja sama AS-Islam bakal menumbangkan segala bentuk kekerasan di dunia dan menegakkan perdamaian. Ia juga menyatakan bahwa hubungan AS-Islam harus dirajut kembali setelah hancur sejak serangan teroris 11 September 2001 serta agresi Amerika ke Irak dan Afganistan.

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat, dia berjanji memerangi persepsi negatif tentang Islam. Hal serupa juga dimintanya kepada

---

[27] Pidato lengkap Presiden Obama di Kairo dapat diakses di http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all [diakses 5 November 2011].

dunia Islam terhadap Amerika Serikat. Kesemuanya diungkapkannya dalam pidato di Kairo tersebut. Presiden Obama dapat dikatakan telah memberikan tanda perdamaian dan pidato ini dapat dikatakan sebagai "permulaan baru" hubungan Amerika Serikat dengan dunia Islam.

Sejarah Amerika di bawah kepemimpinan Bush sangat arogan dalam memandang Islam, meskipun dengan banyak bahasa formal Bush mengatakan pluralisme. Moeslim Abdurrahman menyampaikan hal itu, bahwa Bush seringkali mengatakan bahwa Amerika tidak memusuhi Islam dan Umat Islam, namun konsekuensi kecurigaan yang berlebihan terhadap bahaya "terror islam" sangat dirasakan oleh kaum muslimin, terutama imigran yang tinggal di Amerika maupun Eropa. Mereka itu tidak saja diingatkan agar mentaati dan selalu harus kooperatif dengan aturan-aturan sebagai seorang imigran dengan sedikit kasar, tapi juga pemerintah Amerika menerapkan kebijaksanaan yang berbau diskriminatif.

Namun, pada masa pemerintahan Barack Obama terjadi perubahan. Presiden Obama menjanjikan Amerika baru kepada dunia, Amerika yang mendengarkan suara dunia. Presiden Obama juga menegaskan bahwa Islam bukan musuh Amerika. Dalam wawancara dengan jaringan televisi satelit Al-Arabiya yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab 26 Januari 2009, wawancara pertamanya sejak dilantik menjadi Presiden AS, Barack Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat bukan musuh Islam. Dikatakan bahwa tugas Obama kepada negara-negara muslim adalah mengomunikasikan bahwa AS bukan musuh negara Islam.

Keinginan AS bekerjasama dengan dunia Islam, kembali dipertegas Obama dalam suratnya ke Konferensi Organisasi Islam (OIC), berbasis di Jeddah, yang mewakili 1,5 miliar umat Muslim di 57 negara.[28] Melalui surat yang dikirimkan ke Sekretaris Jendral OIC Ekmeleddin Lhasanoglu, Obama mengatakan akan bekerja untuk meningkatkan hubungan dengan kelompok Islam. Presiden AS Barack Husein Obama membuat sejumlah kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pendahulunya, mantan Presiden George W Bush. Kebijakan itu antara lain menyangkut pendekatan diplomasi dengan negara lain, meliputi: penutupan Kamp Militer Guantanamo, perubahan iklim, aborsi, dan senjata luar angkasa. Dengan berbagai kebijakan itu, Obama mulai menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan Bush. Selain melakukan pendekatan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk dunia Islam. Obama juga mulai membalikkan kebijakan Bush soal perubahan iklim, antara lain dengan langkah peningkatan standar efisiensi bahan bakar.

Obama juga telah menunjuk Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri, untuk berlawat ke Asia Pasifik. Kunjungan tersebut dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya Amerika untuk membangun sebuah jalan baru kepada Dunia Islam. Keberadaan Islam dan Dunia Islam di dunia saat ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah baru Amerika merasa perlu membangun komunikasi lebih intensif dengan Islam dan Dunia Islam, terutama untuk menuntaskan isu-isu yang selama ini melilit Amerika selama pemerintahan Bush, yaitu isu terorisme.

---

[28] http://www.jihadwatch.org/2010/11/obamas-envoy-to-the-oic-in-mali-to-boost-ties-with-islamic-world.html [diunduh 4 November 2011]

Ada perbedaan yang jelas antara pemerintahan Presiden Bush dengan Obama. Pemerintahan Bush pada umumnya menekankan kekuatan militer daripada perundingan diplomatik, sedangkan Pemerintahan Obama lebih kepada perundingan diplomatik. Selanjutnya pemerintahan Obama yang baru akan menjalin lebih mendalam dengan dunia Islam antara lain di Irak, Amerika sedang mengupayakan penarikan pasukan secara bertanggung jawab dan peralihan kekemitraan yang berdasarkan kerjasama diplomatik dan ekonomi, di Timur Tengah, segera melakukan upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk sekali lagi membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai solusi dua negara. AS selama ini telah dikonotasikan sebagai polisi dunia yang arogan dan penuh nafsu kekuasaan serta memberikan stigma negatif tentang Islam dan Dunia Islam, terutama sebelum Pemerintahan Obama. Kebijakan Presiden Obama, seperti dijanjikanna ingin mengakomodasi kepentingan Islam dan Dunia Islam. Tentunya ini akan membawa dampak tersendiri bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan Obama dan Amerika.

Presiden Bush secara resmi mendeklarasikan perang melawan terorisme global pada 20 September 2001 di depan Kongres AS. Presiden Bush lebih memilih unilateralisme dan memfokuskan pada isu keamanan. Perubahan arah kebijakan luar negeri AS tercermin dengan dikeluarkannya dokumen National Security Strategy of 2002 pada bulan September 2002 oleh pemerintah Bush. Terbitnya dokumen tersebut dilandasi oleh pertimbangan untuk member payung konstitusi dan justifikasi atas tindakan-tindakan AS selanjutnya dalam perang melawan teroris dan negara yang mengancam AS. Dari sini dapat dilihat bahwa

Pemerintahan Bush mengubah cara Amerika Serikat berurusan dengan dunia. Dimulai perang terhadap teror yang tidak memiliki batas-batas geografis atau waktu, meningkatkan pengeluaran militer, bertindak secara sepihak, danmengabaikan hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa George W. Bush pada umumnya menekankan kekuatan militer atas perundingan diplomatik. Pada masa pemerintahan Presiden Bush, kepemimpinan Bush dikenal sangat arogan dalam memandang Islam. Dunia Islam selalu dikaitkan dengan terorisme. Selama delapan tahun pemerintahan Bush, popularitas AS di dunia anjlok ke titik terendah.

Terpilihnya Barack Obama menjanjikan kebijakan luar negeri yang berbeda, yaitu lebih diplomatik, lebih sederhana, lebih sesuai dengan lembaga-lembaga internasional dan hukum internasional. Presiden Obama dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar, Mesir, menjelaskan pandangannya mengenai Islam dan pelbagai masalah dunia Islam demi memperbaiki citra AS di mata umat Islam. Banyak alasan yang melatarbelakangi kebencian dunia Islam terhadap AS seperti intervensi para pejabat Gedung Putih terhadap urusan internal dunia Islam, penjarahan kekayaan, invasi militer ke negara-negara Islam seperti Irak dan Afganistan, dukungan mutlak terhadap rezim Zionis Israel dan pelecehan terhadap nilai-nilai suci umat Islam. Selain pidato di Mesir, langkah Obama dalam upaya menaikkan citra Amerika di dunia muslim yaitu memberikan wawancara pers pertamanya dengan al-Arabiya. Dalam wawancara tersebut Barack Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat bukan musuh Islam dan menyatakan bahwa tugasnya kepada negara-negara muslim adalah mengomunikasikan bahwa AS

bukan musuh Islam. Obama pun menegaskan lagi rekonsiliasi Amerika Serikat dengan dunia Muslim. Amerika Serikat berupaya meningkatkan hubungan dengan Negara Islam.

Pada masa Pemerintahan Barack Obama karena adanya kepentingan menaikkan citra akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya (Pemerintahan Presiden Bush) dalam menangani terorisme dan memandang Islam, selain itu Amerika Serikat ingin meningkatkan ekonominya yang memburuk pasca 11 September 2001. Semua itu akan dapat dicapai dengan cara menekankan pentingnya diplomasi publik dalam memajukan kepentingan AS, terutama di Dunia Arab dan negara- negara Islam.